

# Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Mandiri Di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi

Muhammad Ikhsandi Ali<sup>1</sup> Lilis Suriani<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
Muhammadikhсандiali@student.uir.ac.id lilissuriani@soc.uir.ac.id

Received : March 27, 2024;

Accepted : 16 Juli 2024

## Abstract

*The background to this research is that the Village Local Assistants is based on the Minister of Village Regulation No. 4 of 2023, which states that the role of the local village assistant must accompany the village in the process of moving toward an independent village. Problems arise regarding the implementation of village assistance which is still not in line with Village Ministerial Regulation No. 4 of 2023. The focus of research in this thesis is the role of local village assistance in realizing independent villages. This research is based on three indicators, namely, Active Role, Participative Role, Passive Role. This research uses a qualitative research type method. The informants in this research were the Head of Koto Baru Village, the Local Assistant of Koto Baru Village, the Secretary of Koto Baru Village, the Head of the Community Empowerment Section of Singingi Hilir District Village, the Chair of the Karang Taruna of Koto Baru Village, and Ninik Mamak as the traditional authority of Koto Baru Village. Data collection was carried out by interviews, observation and documentation. The role of the Village Local Facilitator in realizing independent village government cannot yet be said to be good, because the Village Local Facilitator experiences obstacles in carrying out his duties optimally.*

**Keywords:** Role, Village Local Companion, Independent Village

## Abstrak

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Pendamping Lokal Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2023 bahwa peran Pendamping Lokal Desa harus mendampingi desa dalam proses menuju desa mandiri. Permasalahan muncul terkait dengan pelaksanaan pendampingan desa yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2023. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah Peran Pendamping Lokal Desa dalam mewujudkan desa mandiri. Penelitian ini didasarkan pada tiga indikator yaitu, Peran Aktif, Peran Partisipatif, Peran Pasif. Penelitian ini menggunakan metode dengan tipe penelitian kualitatif. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa Koto Baru, Sekretaris Desa Koto Baru, Pendamping Lokal Desa Koto Baru, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Singingi Hilir, Ketua Karang Taruna Desa Koto Baru, dan Ninik Mamak selaku pemangku Adat Desa Koto Baru. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Peran Pendamping Lokal Desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri masih belum bisa dikatakan baik, karena Pendamping Lokal Desa mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Pada indikator peran aktif kinerja Pendamping Lokal Desa sudah cukup baik, pada indikator peran partisipatif masih belum cukup baik, pada indikator peran pasif sudah cukup baik.

**Kata kunci :** Peran, Pendamping Lokal Desa, Desa Mandiri

## Pendahuluan

Diferensiasi utama dari model pendampingan setelah penetapan UU Desa ialah terdapat tuntutan pada Pendamping Lokal Desa untuk bisa melaksanakan perubahan sosial melalui pengubahan pendekatan “kontrol dan mobilisasi” pemerintah terhadap desa” menjadi “pemberdayaan masyarakat desa”. masyarakat dan juga pemdes menjadi satu kesatuan self governing community yang diberdayakan supaya hadir sebagai independent community. Oleh karena itu, desa-desa disokong menjadi subjek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan melakukan penguatan Daerah tertinggal, pinggiran, Desa dan perbatasan dalam lingkup Negara Kesatuan.

Pemerintah sudah menciptakan kebijakan guna memberdayakan dan membangun masyarakat desa supaya terwujud desa mandiri. Tingginya tingkat pemberdayaan, menjadikan masyarakat desa bisa mengatasi urusan dan permasalahan pemerintahannya sendiri. Adanya keterlibatan masyarakat dalam planning, organizing, dan actuating dari pembangunan yang dilakukan pemdes dipercaya bisa membawa peningkatan kemakmuran dan mewujudkan masyarakat sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah memberikan tugas pada pendamping desa untuk melakukan pendampingan pada pemdes selama proses pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa .

Guna pencapaian situasi itu, perlu terdapat usaha dalam membangun SDM (Sumber Daya Manusia), maka dari itu pemberdayaan dan perlindungan di Desa sangat penting guna membangun Desa mandiri, berkeadilan, dan sejahtera. Dalam pemahaman desa maupun istilah lainnya seperti yang Solekhan sebutkan bahwasannya UU No 6 Tahun 2014 mengenai Desa sudah dikukuhkan secara tegas keberadaan Desa pada tatanan negara Indonesia. Pada ketentuan UU mengenai Desa, pemerintah melakukan perubahan pendekatan pada Desa, yang mana sebelum itu dengan pendekatan control dan mobilitas pemerintah pada Desa menjadi pemberdayaan Desa.

Pemerintah menghadirkan Pendamping Lokal Desa yang di harapkan mampu memfasilitasi antara masyarakat dengan aparatur pemerintah desa, antar masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan serta mendampingi masyarakat dalam pencerahan, membuka wawasan dan pemahaman, memberikan pendidikan dan keterampilan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diri dan lingkungannya sendiri dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.dikoordinasikan antara perusahaan dengan pemerintah lokal dalam tata Kelola yang baik good governance system.

Pendamping Desa seperti yang telah disebut pada permendesa No 3 Tahun 2015 mengenai Pendamping Desa pada pasal 4-10 disebutkan bahwasannya Pendamping Desa dikerjakan pendamping yang beranggotakan atas: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tenaga Pendamping Profesional, dan Pihak Ketiga. Pada pasal itu turut dijelaskan bahwasannya Tenaga Pendamping Profesional beranggotakan dari:

1. Pendamping Desa (PD) Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat Kecamatanamatan.
2. Pendamping Teknik (PT) yang berada di tingkat Kabupaten.
3. Tenaga Ahli (TA) yang berada di tingkat provinsi atau pusat

Dalam membantu kinerja pendamping desa pada level Kecamatan, sebab itu dirasa perlu terdapat PLD yang berada langsung di desa. Oleh karena itu, terbitlah payung hukum yang jauh tinggi dari permendesa No 3 Tahun 2015, yakni PP 47 Tahun 2015 mengenai perubahan atas PP 43 Tahun 2014 mengenai peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 mengenai desa. Dari PP 47 Tahun 2015, pada pasal 129 sudah ditambahkan PLD termasuk dari tenaga Pendamping Profesional.

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa bahwa pendamping desa adalah bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini tugas pendamping desa adalah:

- a. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
- f. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
- g. Melakukan koordinasi pendampingan desa ditingkat Kecamatanamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota

Berdasar hasil observasi dan beragam sumber informasi yang diperoleh bahwasannya Pendamping Lokal Desa masih belum optimal ketika melakukan pendampingan pada masyarakat sebab Pendamping Lokal Desa yang bertugas kerap tidak hadir ketika ada kegiatan desa yang berakibat pada kinerja dalam melakukan pendampingan pemdes guna memberi bantuan untk pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ataupun kegiatan yang dilaksanakan serta guna melakukan pengawalan dan memberi bantuan pada kinerja aparat desa setempat. Maka dari itu penulis hendak mencari tau sejauh mana peran Pendamping Lokal Desa dalam membantu pemerintah terhadap masyarakat.

Hasil observasi dan informasi yang dilaksanakan oleh Kemendes PDTT pada tahun 2015 sampai 2019, bahwasannya pendamping desa masih belum paham dengan baik mengenai tugas, pokok, dan fungsi serta belum optimal dalam melakukan pendampingan bagi kades, yang berakibat pada kinerja dalam melakukan pendampingan pemdes, supaya lebih baik dalam bentuk sumbangsi gagasan yang sangat terkait dengan pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat.

Walaupun telah terdapat peraturan mengenai perangkat desa, tetapi masih terdapat banyak kekurangan ketika melaksanakan pemerintahan di desa misalnya dalam

pendampingan desa yang dianggap belum effective. Hadirnya Pendamping Lokal Desa, harus cepat tanggap dalam menciptakan strategi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menuntaskan kemiskinan, yang pasti menjadi sasaran utama ialah pembangunan fisik dan sarana prasarana desa dengan maksud membuka selebar-lebarnya terhadap pembangunan di desa. Kehadiran pendamping desa, dibuat supaya bisa memberikan kegunaan dalam penyelenggaraan urusan pemdes, serta kepentingan masyarakat desa.

Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan penyusun menunjukkan bahwa Pendamping Lokal Desa di Desa Koto Baru, Kecamatanamatan Singingi Hilir belum optimal dalam menjalankan tugasnya karena fokus pekerjaan pendamping desa tidak hanya tertuju kepada permasalahan yang ada di desa. Oleh sebab itu peran Pendamping Lokal Desa penting untuk diteliti karena mengingat sasaran yang ingin dicapai terhadap tujuan Pendamping Lokal Desa adalah untuk mempercepat upaya pemerintah dalam pembangunan di Desa.

Sama seperti apa yang diungkapkan figure masyarakat di desa Koto Baru, bahwasannya peran pendamping desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti programe pembangunan fisik, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat Melalui pendampingan lokal desa, masyarakat menjadi lebih proaktif, inisiatif, kreatif, dan antisipatif ketika melakukan kegiatankegiatan sosial ekonomi yang bisa membantu pemenuhan kebutuhannya, termasuk dalam keberhasilan program dana desa, selaras ketentuan UU No 6 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil observasi penulis, diketahui bahwa Peran Pendamping Lokal Desa di desa koto baru terdapat beberapa fenomena. Fenomena tersebut diantaranya :

1. Pendamping Lokal Desa tidak melaksanakan tugas sebagai mana mestinya sesuai Peraturan Kemendesa PD TT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pasal 12 yang hanya dilaksanakan adalah :
  - a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
  - b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat Kecamatanamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan poin-poin diatas pendamping desa hanya melaksanakan 3 dari 7 poin yang disebutkan pada pasal 12 yaitu poin 1,2,dan 7. Sedangkan empat poin lainnya tidak dilaksanakan sama sekali,hal ini yang menjadi dugaan bahwa peran pendamping desa hanya sekedar survey,mengumpulkan data.Padahal sesuai dengan pasal 12 ada 7 poin yang harus dilaksanakan secara maksimal.
2. Pendamping Lokal Desa dengan kepala desa Koto baru sering berselisih paham mengenai tugas dan wewenang masing-masing,hal ini menyebabkan pelaksanaan system pendampingan desa tidak berjalan secara maksimal.

## Tinjauan Pustaka

Peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Levinson dalam Sukanto 2009: 421).

Menurut Veitzal Rivai (2004:148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2005:148), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama yang dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peranan atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran secara terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut dengan "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Syamsir, (2014:86) Aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi adalah peran. Peran didalam suatu organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran sendiri terdiri atas dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang tidak dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Berikut indikator peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243).

1. Peran Aktif, peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi
2. Peran Partisipatif, peran yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja

3. Peran Pasif, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat

Menurut (Soekarto, 2021;212-213) peranan tersebut meliputi pada dua hal diantaranya yaitu:

a. Peran melingkupi norma-norma yang di hubungkan dengan kedudukan seseorang dengan dalam masyarakat luas, peran dalam artian merupakan susunan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

b. Peran yaitu suatu konsep mengenai apa yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai kelompok atau organisasi Peran juga bisa dikatakan sebagai perilaku seseorang yang diperlukan atau penting bagi struktur sosial masyarakat.

## **Metode**

Tipe yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan situasi dimana dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan bagaimana Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mandiri di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Pendeskripsian ini tidak hanya dilakukan untuk mengumpulkan data saja, akan tetapi juga melakukan analisis, dan mengamati fenomena yang sedang terjadi dilapangan

Sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif karena peneliti menganggap metode ini lebih mudah disesuaikan dengan fonomena yang terjadi dilapangan, demikian pula penelitian kualitatif ini dapat membangun hubungan secara langsung antara peneliti dengan informan. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif bukan berbentuk angka-angka melainkan data berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan, catatan memo, dan dokumen pribadi lainnya.

## **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil peneliti pada indikator peran aktif, peneliti melihat Pendamping Lokal Desa masih kurang terlibat didalam pelaksanaan kegiatan desa. Berdasarkan observasi penulis dilapangan, ditemukan pihak desa Koto Baru kurang terbuka terkait masalah anggaran pembangunan kepada pihak Pendamping Lokal Desa Koto Baru. Hal ini tentu menjadi penghambat untuk Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan Pendampingan. Pendamping Lokal Desa sudah melaksanakan tugas pendataan kepada masyarakat desa akan tetapi hanya dilibatkan pada saat proses finishing data saja. Berdasarkan Observasi penulis Pendamping Lokal Desa sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik.

Berdasarkan teori Soejono soekanto (2002:243), dalam peran terdapat indikator peran aktif. peran aktif ialah peran individu seutuhnya untuk senantiasa aktif pada tindakannya di organisasi. Hal itu bisa kita lihat atau ukur melauai kehadiran dan partisipasinya pada organisasi Misalnya memberikan pendampingan pada perencanaan Pembangunan Desa, namun dalam hal ini Pendamping Lokal Desa Koto Baru masih belum secara maksimal dalam menjalankan perannya pada saat mendampingi desa dalam proses pembangunan.

Berdasarkan hasil peneliti pada indikator peran partisipatif, peneliti menemukan bahwa Pendamping Lokal Desa tidak diwajibkan untuk terlibat didalam organisasi masyarakat akan tetapi Pendamping Lokal Desa diharapkan untuk menjadi penghubung antara organisasi masyarakat dengan pemerintah desa. Pendamping Lokal Desa masih kurang optimal dalam mendampingi Kepala Desa dalam melaksanakan perumusan peraturan desa karena Pendamping Lokal Desa kurang dilibatkan didalam hal tersebut.

Menurut teori oleh Soejono soekanto (2002:243), terdapat indicator peran partisipatif, peran partisipatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja. Seperti melakukan sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat. Penulis ingin mengetahui sejauh mana keterlibatan Pendamping Lokal Desa di dalam lingkungan masyarakat, namun berdasarkan observasi penulis dilapangan penulis menemukan bahwa Pendamping Lokal Desa kurang dilibatkan di dalam organisasi masyarakat dan pada saat proses pembuatan peraturan Desa Koto Baru.

Berdasarkan hasil peneliti pada indicator peran pasif, Pendamping Lokal Desa sudah aktif didalam memberikan masukan kepada pihak pemerintah desa dan memberikan evaluasi terkait kinerja pemerintahan desa Koto Baru. Pendamping Lokal Desa sudah cukup baik dalam melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa, akan tetapi masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pihak Pendamping Lokal Desa. Pendamping Lokal Desa harus lebih aktif lagi dalam memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan desa. Pendamping Lokal Desa cukup aktif dalam melaksanakan monitoring kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kegiatan monitoring, pihak Pendamping Lokal Desa masih belum secara maksimal dalam melakukan tugasnya. Hal ini disebabkan pihak dari pemerintahan desa masih kurang terbuka kepada Pendamping Lokal Desa, Pihak Pendamping Lokal Desa merasa kegiatan mereka terganggu akibat pihak pemerintahan desa kurang terbuka baik dari segi anggaran maupun segi lainnya.

Berdasarkan teori oleh Soejono soekanto (2002:243), Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat. Seperti melakukan pemantauan terhadap Pembangunan Desa. Penulis ingin melihat seperti apa bentuk Peran Pasif yang dilaksanakan oleh Pendamping Lokal Desa Koto Baru. Berdasarkan observasi penulis dilapangan, Pendamping Lokal Desa sudah cukup baik dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa koto baru. Namun didalam pelaksanaan tugas tersebut Pendamping Lokal Desa mengalami kendala dikarenakan pihak pemerintah desa masih kurang terbuka kepada Pendamping Lokal Desa.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas terkait Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Mandiri di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Banyak yang penulis temui berdasarkan wawancara dan observasi langsung ke lapangan kepada seluruh informan yang diperlukan dengan tiga indikator yaitu Peran Aktif, Peran Partisipatif, Peran Pasif penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pada indikator Peran Aktif, terlihat bahwa Pendamping Lokal Desa masih kurang terlibat terhadap pembangunan desa. Penulis menemukan Pendamping Lokal kurang dilibatkan

dalam sektor pembangunan desa. Berdasarkan observasi penulis dilapangan, ditemukan pihak desa Koto Baru kurang terbuka terkait masalah anggaran pembangunan kepada pihak Pendamping Lokal Desa Koto Baru. Hal ini tentu menjadi penghambat untuk Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan Pendampingan. Pendamping Lokal Desa sudah melaksanakan tugas pendataan kepada masyarakat desa akan tetapi hanya dilibatkan pada saat proses finishing data saja. Berdasarkan Observasi penulis Pendamping Lokal Desa sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik.

2. Pada indikator Peran Partisipatif, terlihat bahwa Pendamping Lokal Desa tidak diwajibkan untuk terlibat didalam organisasi masyarakat akan tetapi Pendamping Lokal Desa diharapkan untuk menjadi penghubung antara organisasi masyarakat dengan pemerintah desa. Pendamping Lokal Desa masih kurang optimal dalam mendampingi Kepala Desa dalam melaksanakan perumusan peraturan desa karena Pendamping Lokal Desa kurang dilibatkan didalam hal tersebut.

3. Pada indikator Peran Pasif, terlihat bahwa Pendamping Lokal Desa sudah melakukan Monitoring dan valuasi kepada pemerintah desa Koto Baru dengan cukup baik. Pendamping Lokal Desa melaksanakan Monitoring dalam bentuk mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Koto Baru. Pendamping Lokal Desa telah memberikan evaluasi kepada pemerintah desa Koto Baru dalam bentuk saran dan masukan yang nantinya menjadi pertimbangan untuk pemerintah desa Koto Baru

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku dan Jurnal:**

- Ahmad Rucky, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Antholilah, anton. 2010. Dasar – Dasar Manajemen. Bandung : Pustaka setia.
- Azhari, Idham Ibtu dkk, 2002, Good Governance dan Otonomi Daerah, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Bappenas. 2004. Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang baik. Jakarta: Sekretariat.
- Budiarjo, Miriam. 2003, Dasar-Dasar Politik. Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, Imam, 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta : Bumi Askara
- Handoko, T. Hani, 2003, Manajemen Edisi Kedua, BPFE:Yogyakarta.
- Hasibuan (20016:85) Koordinasi Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board



- of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.

- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET

- KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbang Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).

- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis-Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.

- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU

KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.

- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.

- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Hasibuan, Melayu 2011. Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara
- Kumorotomo, 1994, etika administrasi negara, Jakarta, Rajawali Pers
- Mantja. 2007. Etnografi; Desain Penelitian Kualitatif Pendidikan dan Manajemen Pendidikan. Malang: Elang Mas
- Moleong J. Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Munaf, Yusri, 2016. Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru
- Nurcholis dan Enceng, 2019. Administrasi Pemerintah Daerah. Universitas Terbuka. Banten.
- Rahyunir Rauf dan Maulidiah Sri, 2015, Pemerintahan Desa, Yogyakarta, Nusa Media.
- Rivai, Veithzal dan Ahmad Fawzi Mohd Basri, 2005. Performance Appraisal. Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Salam, Drama Setiawan, 2002, Human Resource Scorecad : Suatu Model Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia, Penerbit Amara Books, Jogjakarta.
- Sarundajang, 2001, Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P, 1997, Filsafat Administrasi, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sedarmayati. 2005, Good Governance ( Kepemerintahan Yang Baik ) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan. Bandung, Mandar Maju.
- Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto. 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahad, Solicichin Abdul. 2004. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara
- Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wiryasaputra, Totok. S. 2006. Ready To Care: Pendamping dan Konseling Psikoterapi. Yogyakarta: Galang Press.
- Irfan, M. Tahir ( 2020 ). Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi Di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima). Jurnal Pendidikan Sosiologi, Volume 3, Nomor 2, Desember 2020
- M. Saleh Laha, Ronaldi Dorohungi ( 2021 ). Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor. Jurnal Pemerintahan dan Politik, Volume 1, Nomor 1, 2021
- Muhammad Fajri Adriansah, Ika Sartika, Andi Ony ( 2022 ). Kinerja Tenaga Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Jurnal Kajian Pemerintah (JKP), Volume 8, Nomor 2, Oktober 2022

### **Regulasi:**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.